

STRATEGI MENGATASI PENGANGGURAN AKIBAT PANDEMI COVID-19

STRATEGIES TO OVERCOME UNEMPLOYMENT DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC

Rindi Yuliyanti*, Nida Handayani

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan

*Koresponden email: rindiyuli238@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia, jumlah pengangguran bertambah karena banyak pekerja yang dirumahkan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan pengangguran dan berpeluang untuk terus meningkat. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan pokok yang sampai saat ini penanganan masih diupayakan. Penelitian ini bertujuan untuk meng-analisis strategi mengatasi pengangguran akibat pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat strategi. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hunger dan Wheelen dengan tiga indikator, maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator program, terdapat berbagai kegiatan yang dilaksanakan seperti pelatihan, pembuatan Kartu Kuning (AK I) bagi pencari kerja, dan pelayanan antar kerja untuk menempatkan tenaga kerja. Namun, terdapat kegiatan yang belum bisa terlaksana yaitu *job fair* bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Pada indikator anggaran, pelaksanaan strategi kegiatan program memiliki anggaran yang berasal dari APBD, namun anggaran untuk memenuhi kebutuhan kegiatan program mengalami pengurangan dana di masa pandemi Covid-19. Pada indikator prosedur, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah mengikuti tahapan dan persyaratan, dan dinas bekerja sama dengan beberapa pihak seperti LPK dan perusahaan.

Kata kunci: Strategi, program, pengangguran, tenaga kerja

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has an impact on the employment sector in Indonesia, the number of unemployed has increased because many workers have been laid off and experienced layoffs. South Tangerang City is experiencing an increase in unemployment and has the opportunity to continue to increase. Unemployment is one of the main problems that until now is still being pursued. This study aims to analyze strategies to overcome unemployment due to the Covid-19 pandemic in South Tangerang City and analyze the supporting and inhibiting factors of the strategy. This research method uses a descriptive method with a qualitative approach and data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this study are based on the theory proposed by Hunger and Wheelen with three indicators, it can be concluded that in the program indicators, there are various activities carried out such as training, making Yellow Cards (AK I) for job seekers, and inter-employment services to place workers. However, there is an activity that has not been able to be carried out, namely the Job Fair for the people of South Tangerang City. In the budget indicator, the implementation of the program activity strategy has a budget derived from the APBD, but the budget to meet the needs of program activities has been reduced funds during the Covid-19 pandemic. In the procedure indicators, the activities carried out have followed the stages and requirements, and the department cooperates with several parties such as LPK and companies.

Keywords: Strategy, program, unemployment, labor

PENDAHULUAN

Persoalan ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19 yaitu meningkatnya angka pengangguran baik secara nasional di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia. Kondisi Indonesia sedang berada disituasi untuk menghadapi bonus demografi sekaligus menghadapi pandemi. Pemerintah perlu melakukan pemetaan terutama di sektor ketenagakerjaan untuk dapat memberikan gam-

baran kondisi terkait ketenagakerjaan yang baru pasca pandemi Covid-19.

Dampak dari pandemi Covid-19 dialami juga oleh Provinsi Banten, pada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan lain-lain. Salah satu sektor yang berdampak yaitu sektor pekerjaan atau ketenagakerjaan. Tidak dapat dibantahkan bahwa sektor ketenagakerjaan dalam hal ini yaitu pengangguran menjadi dampak dari pandemi Co-

vid-19, secara nasional terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya karena adanya Covid-19 dan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Provinsi di Indonesia pada bulan Februari 2020 sampai bulan Februari 2021 mengalami peningkatan. Pada masa ini, Indonesia masih menghadapi Covid-19 yang jumlah kasus harian nya terus meningkat. Sedangkan pada bulan Februari 2021 masing-masing Provinsi di Indonesia bisa menurunkan angka pengangguran secara perlahan-lahan. Dan Provinsi Banten berada pada posisi terbanyak kedua sebesar 9,01% tingkat pengangguran setelah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10,12%.

Tangerang Selatan merupakan Kota di wilayah Provinsi Banten yang mengalami masalah peningkatan jumlah pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan mendata bahwa per Agustus 2021 jumlah pengangguran mencapai 84.000 orang. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan yaitu Bapak Drs. H. Sukanta, mengatakan bahwa jumlah pengangguran di Tangerang Selatan terbilang sedikit dibandingkan dengan jumlah pengangguran di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen), 2018-2020.

Kabupaten/Kota	TPT Kab/Kota di Provinsi Banten		
	2018	2019	2020
Kab Lebak	7,57	7,96	9,63
Kab Pandeglang	8,11	8,67	9,15
Kab Serang	12,63	10,58	12,22
Kab Tangerang	9,63	8,92	13,06
Kota Cilegon	9,21	9,64	12,69
Kota Serang	8,10	8,07	12,69
Kota Tangerang	7,39	7,14	9,26
Kota Tangerang Selatan	4,67	4,78	8,48
Provinsi Banten	8,47	8,11	10,64

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2018-2020

Dari data tersebut Kota Tangerang Selatan di tahun 2020 menempati posisi terendah angka pengangguran terbuka dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten. Namun, pada tahun 2021 angka tersebut akan terus bertambah selama kasus Covid-19 masih meningkat dan masih sulitnya bagi perusahaan, tempat usaha, atau sektor swasta untuk beroperasi seperti semula sebelum adanya Covid-19. Jika dilihat dari data di atas, Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan

pengangguran cukup besar pada tahun 2019 sampai 2020 sebesar 3,7 persen.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 yang terdata sampai Oktober 2020 yaitu sebanyak 3.020 pekerja dari 53 industri. Berdasarkan berita online, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan Bapak Drs. H. Sukanta, mengatakan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap kondisi keuangan industri dan pelaku usaha di Tangerang Selatan. Sehingga, langkah untuk PHK menjadi pilihan yang diambil oleh dunia industri. Dari 1.892 pekerja yang di PHK di Tangerang Selatan, sebanyak 1.050 pekerja masyarakat yang berasal dari Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data tersebut, maka ada peluang bertambahnya jumlah masyarakat Kota Tangerang Selatan yang di PHK akibat pandemi Covid-19. Selain itu, sebanyak 941 pekerja harus dirumahkan di masa pandemi Covid-19. Data tersebut berpeluang mengalami penambahan dikarenakan kasus Covid-19 masih belum stabil sampai akhir tahun 2021 ini.

Kota Tangerang Selatan sebelum adanya pandemi Covid-19 merupakan daerah yang cukup maju, wilayah yang strategis, sistem perekonomian yang cukup baik, tingkat pendidikan masyarakat baik, dan banyaknya pelaku usaha. Tangerang Selatan jika dibandingkan dengan daerah lain yang seusia, maka Tangerang Selatan dapat dikatakan daerah otonom yang baik. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 dan dampak yang diberikan membuat Kota Tangerang Selatan harus mengatasi permasalahan akibat pandemi. Salah satunya adalah permasalahan pengangguran yang meningkat dikarenakan banyak usaha/bisnis yang bangkrut/ditutup. Persaingan di dunia kerja yang semakin hari semakin sulit dan menantang dengan kemampuan yang harus dimiliki bagi para pencari kerja, maka dibutuhkan kemampuan yang harus dimiliki oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan yang akan atau sedang mencari pekerjaan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja tahun 2020 yaitu untuk mengatasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan seperti perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengangguran, pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan, hubungan industrial, kapasitas dan kompetensi SDM internal, standarisasi sistem dan prosedur, sinergitas lintas sektoral dan stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan.

Pemerintah harus segera tanggap dan cepat dalam memecahkan permasalahan pengangguran yang semakin meningkat. Pemerintah harus meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat (Franita, 2016). Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengatasi kenaikan angka pengangguran salah satunya adalah dengan strategi melakukan kegiatan “Pelatihan Kerja”. Berdasarkan informasi terkait kegiatan pelatihan yang terdapat pada website Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan (<https://disnaker.tangerangselatankota.go.id/>) untuk tahun 2021 telah dilaksanakan pelatihan kerja “Barista Coffee” kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan di Omblek Coffee, Serpong, Senin (24/5/21). Selain pelatihan “Barista Coffee” selanjutnya dilaksanakan kegiatan “Pelatihan Komputer” yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan pada bulan Agustus 2021 di tempat pelatihan LPK Neta Multi Nasional yang beralamat di Jl. Raya Serpong.

Setelah melakukan beberapa kegiatan pelatihan di awal sampai pertengahan tahun 2021, jumlah pengangguran di Kota Tangerang Selatan masih mengalami peningkatan dengan berbagai faktor seperti adanya kebijakan PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat, lapangan pekerjaan yang belum ada serta berbarengan dengan kondisi kelulusan pelajar dan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sehingga tingkat persaingan semakin ketat dengan jumlah lapangan pekerjaan yang semakin sedikit di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan bahwa per Agustus 2021 jumlah pengangguran mencapai 84.000 orang dan memiliki peluang untuk terus meningkat karena kasus Covid-19 yang juga meningkat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi yang dilakukan dalam mengatasi pengangguran di Kota Tangerang Selatan dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi dalam hal mengatasi pengangguran. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi strategi yang dikemukakan oleh (Hunger dan Wheelen, 2003) dengan indikator program, anggaran, dan prosedur yang dianggap relevan dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi permasalahan terkait pengangguran dan ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan.

Implementasi kebijakan menurut (Agustino, 2006) yaitu pelaksanaan kebijakan dasar, umumnya dalam bentuk Undang-Undang, dan dapat pula berbentuk perintah-perintah ataupun keputusan

eksekutif atau keputusan badan peradilan. Ilmu administrasi publik mempelajari bagaimana kebijakan itu dapat diterapkan dengan baik dan mempelajari terkait manajemen SDM dan organisasi publik, pada penelitian ini selain untuk mengetahui pelaksanaan strategi mengatasi pengangguran yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Rencana Strategis yang berisi tentang program dan sasaran yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2013) bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah (*natural setting*), objek alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pelaksanaan penelitian ini dalam bentuk lapangan (*field research*) yaitu dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dimana diharapkan dapat menggali lebih lengkap informasi yang disampaikan oleh informan. Pada penelitian ini terdapat beberapa informan yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan, Lembaga Pelatihan Kerja, dan Masyarakat Kota Tangerang Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didapatkan berdasarkan data yang ada di lapangan dan berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi Pemerintah Daerah dalam upaya mengatasi pengangguran akibat pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan dan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi strategi dalam mengatasi pengangguran di Kota Tangerang Selatan. Tahapan implementasi strategi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategi. Konsep strategi pemerintah (Nawawi, 2008) yaitu cara terbaik untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebijakan, tujuan dan program kerja pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi strategi dari J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003) yang terdiri dari 3 (tiga)

indikator yaitu, program, anggaran, dan prosedur. Sebelumnya perlu diketahui terkait pengangguran menurut (Sukirno, 2004) dalam (Widayati, 2021) salah satu jenis pengangguran yaitu Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) tenaga kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Umumnya pengangguran jenis ini cukup banyak karena disebabkan oleh belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal untuk bisa mendapat pekerjaan.

Program

Pelaksanaan implementasi strategi, yaitu pernyataan aktivitas atau langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran yang meningkat akibat adanya pandemi Covid-19 beberapa tahun ini, maka pemerintah Kota Tangerang Selatan pada hal ini yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan melakukan upaya-upaya untuk menjawab permasalahan tersebut dengan mengeluarkan dan mengembangkan program seperti program pengembangan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan pelatihan kerja untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan, kemudian program peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.

Program dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan untuk mengatasi peningkatan pengangguran yang ada. Urusan ketenagakerjaan merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan. Program dapat dikatakan berhasil karena tidak terlepas dari strategi yang diterapkan dalam proses sebelum dan saat pelaksanaan program (Wibawani, 2022). Sehingga akan tercapai pelaksanaan strategi yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh organisasi.

Program pengembangan produktivitas tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja yang terampil dan dapat mengembangkan kompetensi pada tingkat keterampilan dan keahlian kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, strategi yang dilakukan yaitu adanya pendidikan pelatihan permintaan masyarakat dan sesuai pasar potensi dengan kebijakan meningkatkan kompetensi tenaga kerja Kota Tangerang Selatan melalui pendidikan, pelatihan dan pemberian sertifikasi.

Dinas Tenaga Kerja Kota Tangsel melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan salah satu program yang ditujukan sebagai upaya untuk mengatasi pengangguran di Kota Tangerang Selatan yaitu pengembangan produkti-

vas tenaga kerja dengan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan ketenagakerjaan dan mengatasi masalah pengangguran yang terjadi saat ini. Kegiatan-kegiatan pelatihan yang sudah dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19 sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi tingkat pengangguran yang semakin naik. Pada dasarnya pelatihan tidak hanya dilakukan di masa pandemi Covid-19 melainkan dilakukan juga di tahun-tahun sebelum pandemi. Hanya saja di masa pandemi Covid-19 pelatihan sangat diminati oleh masyarakat yang mengisi waktu kosong akibat harus dirumahkan atau di PHK dari tempat kerja. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di masa pandemi yaitu harus membatasi jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Alasan masyarakat mengikuti kegiatan pelatihan yaitu untuk mengisi waktu kosong disaat menunggu panggilan interview atau panggilan kerja.

Program pengembangan produktivitas tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja yang terampil dan dapat mengembangkan kompetensi pada tingkat keterampilan dan keahlian kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, strategi yang dilakukan yaitu adanya pendidikan pelatihan permintaan masyarakat dan sesuai pasar potensi dengan kebijakan meningkatkan kompetensi tenaga kerja Kota Tangerang Selatan melalui pendidikan, pelatihan dan pemberian sertifikasi.

Pelatihan yang diminati salah satunya adalah menjahit, dimana masyarakat lebih cepat untuk mendaftar pada kegiatan pelatihan tersebut. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan masing-masing pelatihan memiliki kuota rata-rata 15-20 peserta. Jumlah tersebut memang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten. Pada tahun 2022 terdapat program pelatihan yang baru seperti pelatihan video konten, karena di era digital ini pemanfaatan Media Sosial di kehidupan dapat memberikan dampak positif apabila dikelola dengan baik. Kemudian, terdapat pelatihan menjahit sepatu yang mencapai 51 orang, pelatihan tersebut diselenggarakan agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya terutama pada bidang pembuatan sepatu mengingat di Kota Tangerang Selatan terdapat perusahaan besar yang memproduksi sepatu dan diharapkan masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan dapat bekerja di

perusahaan tersebut sehingga perlahan jumlah pengangguran dapat berkurang.

Pada program kegiatan penempatan tenaga kerja terdapat beberapa kegiatan yang menjadi strategi untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Kota Tangerang Selatan, seperti kegiatan pelayanan antar kerja di Kabupaten/Kota, pembuatan Kartu Kuning (AK I) untuk mendata jumlah pengangguran yang ada di Kota Tangerang Selatan, dan kegiatan terkait informasi pasar kerja bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya kegiatan pelayanan antar kerja dan kegiatan Informasi Pasar Kerja (IPK) menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Pelayanan antar kerja atau pelayanan penempatan kerja merupakan kegiatan pelayanan kepada dua pihak yaitu pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki, pihak kedua yaitu perusahaan sebagai pemberi kerja untuk mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tingkat pengangguran di Tangerang Selatan mengalami kenaikan, ternyata jumlah penempatan kerja mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan adanya penempatan kerja ini masyarakat Kota Tangerang Selatan dapat bekerja setelah masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19. Penempatan tenaga kerja ini dapat mencapai perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan dan dapat mengurangi angka pengangguran dengan mekanisme penempatan tenaga kerja antar Kabupaten/Kota maupun antar Daerah.

Anggaran

Pada saat mengimplementasikan strategi yang telah direncanakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal yang pertama diperhatikan adalah melaksanakan pengembangan program, program dapat dilaksanakan karena adanya anggaran yang akan mendukung dan memfasilitasi kegiatan dari program yang telah direncanakan. Pada implementasi strategi dalam upaya mengatasi pengangguran, terdapat peran anggaran yang merupakan unsur penting dalam mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan sehingga dapat mencapai tujuan. Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan program kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, dan program penempatan kerja memiliki dana kegiatan yang berasal dari APBD yang dialokasikan ke Dinas Tenaga Kerja.

Penggunaan anggaran untuk program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dialokasikan untuk beberapa kegiatan pelatihan yang sudah direncanakan dan kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik. Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian, anggaran digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan di masa pandemi Covid-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan pelatihan.

Kegiatan pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota untuk anggaran Kota Tangerang Selatan tahun 2021 membutuhkan anggaran sebesar Rp210.592.000 yang termasuk didalamnya terbagi menjadi anggaran dari beberapa kegiatan yang berkaitan dengan program penempatan tenaga kerja seperti kegiatan penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja, kegiatan Pelayanan antar Kerja termasuk Bimtek Pelayanan antar Kerja. Dari pagu anggaran tersebut, memiliki realisasi sebesar Rp170.450.000 dengan sisa anggaran sebesar Rp40.142.000. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja pada tahun 2021 realisasi anggaran memberikan sisa Rp356.038.150 dari pagu anggaran yang ditetapkan. Hal yang sama terjadi pada anggaran program penempatan tenaga kerja yang memberikan sisa Rp151.310.200 dengan rincian penggunaan anggaran untuk beberapa kegiatan yang ada di dalam program tersebut. Anggaran yang digunakan untuk pelatihan di tahun 2021 rata-rata sebesar 71 juta sampai 86 juta, angka tersebut adalah rata-rata yang diperoleh dari LAKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan. Selain itu, terdapat pelatihan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp101.244.000 yang direalisasikan kepada pelatihan *Food & Beverage* (Tata Hidang).

Mulai dari kondisi Covid-19 dikasus-kasus awal sampai kondisi saat ini, anggaran untuk kegiatan pelatihan masih mengalami pengurangan dari jumlah anggaran yang harus diterima. Pengurangan atau diberhentikan (*refocusing*) anggaran yaitu untuk penanganan Covid-19, anggaran yang semula digunakan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan di tahun 2020, 2021, 2022 harus dikurangi dengan maksud akan digunakan untuk penanganan Covid-19. Di masa pandemi Covid-19 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sudah dilakukan dengan maksimal. Namun, anggaran tersebut mengalami pengurangan sekitar 30%-40% dari anggaran yang seharusnya diterima.

Kondisi anggaran Dinas Tenaga Kerja Tangerang Selatan mengalami penurunan drastis dan

diberhentikan (stop) karena pada tahun inilah kasus Covid-19 setiap harinya mengalami peningkatan yang mengakibatkan sektor ketenagakerjaan berdampak karena banyaknya perusahaan, tempat untuk berusaha, dan lain sebagainya tidak dapat beroperasi maksimal dan harus mengurangi tenaga kerja atau memberhentikan pegawainya. Oleh karena itu, anggaran untuk Dinas Tenaga Kerja mengalami pengurangan, dan anggaran juga sempat mengalami penyetopan karena harus dikembalikan ke pusat untuk digunakan pada prioritas utama yaitu mengatasi Covid-19 dengan program pemulihan ekonomi.

Pada anggaran pelatihan di tahun 2021 dimana kondisi saat itu masih banyak kasus Covid-19, sehingga anggaran pelatihan termasuk digunakan untuk Swab Antigen bagi para peserta. Penggunaan anggaran pelatihan salah satunya digunakan untuk pembayaran Lembaga Pelatihan Kerja yang memberikan materi pelatihan kepada peserta. Selain itu, dalam pelaksanaan pelatihan anggaran juga digunakan untuk biaya-biaya yang mendukung pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan beberapa kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan masyarakat Kota Tangerang Selatan menggunakan anggaran yang telah direncanakan pada pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja.

Prosedur

Prosedur atau *Standard Operating Procedures* (SOP) sebagai sistem langkah-langkah atau teknik yang berurutan dan rinci dalam menggambarkan bagaimana suatu tugas atau pekerjaan atau program-program yang harus diselesaikan. Pada implementasi strategi prosedur dibuat untuk mencapai tujuan dari implementasi tersebut. Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan membuat prosedur atau langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam hal ini yaitu peningkatan jumlah pengangguran yang semakin lama meningkat akibat adanya pandemi Covid-19 dan Angkatan Kerja yang meningkat setiap tahunnya.

Prosedur dalam pelaksanaan implementasi strategi dalam upaya mengatasi pengangguran, temuan yang dihasilkan yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi indikator prosedur. Dari masing-masing kegiatan program seperti kegiatan pelatihan, pelayanan antar kerja, pembuatan Kartu 83 Kuning (AK) mengikuti SOP atau langkah yang harus dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan pada setiap kegiatan. Tahapan awal yang dilakukan yaitu melakukan

rapat-rapat untuk kegiatan yang ingin dilaksanakan, seperti rapat persiapan, lalu rapat pembentukan tim yang akan terlibat atau bertanggung jawab pada setiap kegiatan dan tugas yang dilaksanakan.

Pada kegiatan pelatihan untuk saat ini tidak ada kerja sama dengan instansi lain dikarenakan belum adanya MoU, melainkan bekerja sama dengan beberapa Lembaga Pelatihan Kerja sekitar 15-16 LPK, dan bekerja sama dengan perusahaan seperti Bengkel Automekanika. Sedangkan untuk menentukan Instruktur pada kegiatan pelatihan harus memenuhi syarat yaitu sudah bersertifikat BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sudah diakui secara nasional dan legal. Kedua, Instruktur yang hanya mempunyai sertifikasi lokal. Dengan adanya syarat tersebut pelatihan yang diselenggarakan sudah sesuai.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Implementasi strategi dengan memperhatikan pada indikator program, anggaran, dan prosedur dapat telaksana dengan baik. Hanya saja, terdapat beberapa faktor dalam melaksanakan strategi tersebut, adanya faktor pendukung yaitu Sumber Daya Manusia di Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan sudah baik dalam melaksanakan program-program dengan adanya kerja sama internal untuk saling membantu dalam pelaksanaan kegiatan.

Penghambat dalam implementasi strategi yaitu peningkatan jumlah PHK yang mempengaruhi terjadinya peningkatan pengangguran, pada pelaksanaan program dan kegiatan masih mengalami hambatan karena kasus Covid-19 yang masih belum stabil. Pada kegiatan pelatihan hambatan yang dialami tidak terlalu berdampak pada pelaksanaan, karena kurangnya motivasi peserta pelatihan sehingga cara belajar akan berbeda seperti mudah memahami proses pelatihan atau sebaliknya. Selain itu, karena tidak memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) dan sarana prasarana untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan mengakibatkan pelatihan diselenggarakan di tempat LPK, dan setiap LPK lokasinya berbeda-beda. Hal tersebut membuat para peserta mengalami sedikit hambatan yaitu jarak lokasi pelatihan yang cukup jauh dari tempat tinggal. Selain itu masih kurangnya pemanfaatan media sosial untuk sosialisai program kegiatan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan.

Tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan yaitu: 1) belum terpenuhinya tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dari standar perusahaan/industri; 2) adanya kecenderungan pe-

ningkatan jumlah pengangguran di Kota Tangerang Selatan; 3) adanya ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan pencari kerja dengan keahlian (*skill*) yang dibutuhkan pada lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini; 4) meningkatnya PHK akibat pandemi Covid-19; 5) masih adanya kasus perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha; 6) kasifikasi sektor formal dan informal akibat perubahan pola industri digital tidak cocok dengan klasifikasi yang ada saat ini.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan masih mengalami hambatan karena kasus Covid-19 yang masih belum stabil. Pada kegiatan pelatihan hambatan yang dialami tidak terlalu berdampak pada pelaksanaan, karena kurangnya motivasi peserta pelatihan sehingga cara belajar akan berbeda seperti mudah memahami proses pelatihan atau sebaliknya. Selain itu, karena tidak memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) dan sarana prasarana untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan mengakibatkan pelatihan diselenggarakan di tempat LPK, dan setiap LPK lokasinya ber-beda-beda. Hal tersebut membuat para peserta mengalami sedikit hambatan yaitu jarak lokasi pelatihan yang cukup jauh dari tempat tinggal. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi yaitu komunikasi yang sudah efektif namun masih ada para pencari kerja yang masih memilih-milih pekerjaan, sumberdaya yang ada belum memadai, sikap pelaksana sudah cukup baik, dan struktur birokrasi yang memiliki SOP cukup rumit (Putri, A.F., et al., 2019).

KESIMPULAN

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran di Kota Tangerang Selatan melalui program yang telah direncanakan sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Beberapa kegiatan dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam memperoleh pekerjaan seperti pelatihan-pelatihan seperti menjahit sepatu yang menjadi salah satu pelatihan yang diminati oleh masyarakat. Pandemi Covid-19 membuat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena menghindari hal-hal yang dapat membentuk kerumunan khalayak dan penyebaran Covid-19. Anggaran sampai saat ini masih mengalami pengurangan yang disebabkan anggaran dikembalikan dan digunakan oleh pusat untuk prioritas pada penanganan Covid-19. Pada prosedur pelaksanaan implementasi strategi telah sesuai dengan memperhatikan SOP dan tahapan/langkah kegiatan, serta melakukan kerja sama dengan perusahaan dan LPK. Namun kerja sama tersebut masih kurang dan koordinasi antar Dinas Tenaga Kerja dengan

instansi yang lain juga masih kurang dan harus dikembangkan lagi. Selaras dengan hasil penelitian (Heriyanto, 2014) bahwa hambatan dalam implementasi strategi salah satunya adalah Koordinasi antar organisasi Kerja, yaitu koordinasi sebagai proses integrasi antara tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Badan Pusat Statistik. 2020. Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,26 persen. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen), 2018-2020. <https://banten.bps.go.id/indicator/6/157/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota.html>. (10 Oktober 2021)
- Franita, R. (2016). Analisa Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(12), 88-93. ISSN : 2541-657X. URL : <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/File/97/97>. Diakses pada tanggal 07 Februari 2022
- Heriyanto, M. (2014). Implementasi Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 9-16. DOI <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v5i3.2218>
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2003). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: ANDI.
- Krisnandika, V. R., Aulia, D., & Jannah, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 638-648. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2227>.
- Napitupulu, D dkk. (2020). *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Nawawi, H. (2008). *Dinamika Strategi program dan Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Putri, A. F., & Mubarak, A. (2019). Implementasi Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Menanggulangi Pengangguran Terbuka

- di Provinsi Sumatera Barat. *Journal of RESIDU*, 3(20), 25-33. ISSN : 2598-8131 (online) dan ISSN : 2598-814X (print). Diakses pada 19 Oktober 2021
- Parapak, K.P., Muhammad N., dan Rita K.L. (2018). Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Mengatasi Pengangguran di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 386-398. ISSN : 2477-2631 (online). Diakses pada tanggal 30 September 2021
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawani, S. (2022). Strategi Pemberdayaan Program Karepe Dimesemi Bojo Pada Penyandang Disabilitas Mental. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 321-329. DOI <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8027>
- Widayati, T. (2021). Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi. Cirebon: Insania.